

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Asnaini (2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai efek negatif yang signifikan pada Pembiayaan bermasalah (NPF), sedangkan inflasi tidak signifikan mempengaruhi Pembiayaan bermasalah (NPF).

Penelitian Ferawati (2016) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan BOPO mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan inflasi mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NPF.

Penelitian Alissanda (2015) mengenai Pengaruh CAR, BOPO dan FDR terhadap *Non Performing Finance* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, sedangkan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

Penelitian Lidyah (2016) mengenai Dampak Inflasi, *BI Rate*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF, CAR berpengaruh negatif terhadap NPF sedangkan BOPO berpengaruh positif terhadap NPF.

Penelitian Arisa (2016) mengenai Analisis Pengaruh *Financing Deposito Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional Pendapatan

Operasional (BOPO) dan Total Aset terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Studi Empiris pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Kota Padang, Sumatera Barat Periode 2013-2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Penelitian Effendi, dkk (2017) mengenai *Factors Influencing Non Performing Financing (NPF) at Sharia Banking*. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) secara negatif dan signifikan adalah inflasi dan CAR sedangkan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Penelitian Setiawan dan Bagaskara (2016), mengenai *Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2*. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang menentukan NPF dengan menggunakan panel least square, temuan mengungkapkan bahwa Inflasi dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki efek negatif dan signifikan terhadap NPF, sementara Rasio Efisiensi Operasional memiliki efek positif dan signifikan pada NPF.

Penelitian Rosida dan Kusuma (2017) mengenai *Determinan Non Performing Financing Sharia Bank in Indonesia Perbankan Syariah in Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) , beban operasional pendapatan operasional (BOPO) dan inflasi merupakan variabel yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF). Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan pengaruh beban operasional pendapatan operasional (BOPO) dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Efisiensi

Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih

kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:569).

Di dalam teori perusahaan dan analisis biaya dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan sejenis yang survive apabila mereka memiliki kiat produksi tersendiri dan manajemen yang efisien yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain sejenis dengan pasar yang sama. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan dalam organisasi itu termasuk efisien atau tidak maka prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut (Syamsi, 2014): (1) Efisiensi harus dapat diukur, (2) Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional, (3) Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas, (4) Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan (5) Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan, (6) Efisiensi itu ada tingkatannya, bisa dengan prosentase.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah,

keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat (Mudrajad dan Suhardjono, 2011:569).

Menurut Kasmir (2012:36), untuk mengukur efisiensi suatu bank dapat dinilai melalui beberapa rasio efisiensi bank, penilaian efisiensi yang didasarkan pada Rentabilitas suatu bank didasarkan pada :

1. *Beban operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)*

Rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu.

2. *Cost Efficiency Ratio (CER)*

Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar biaya non-bunga yang dikeluarkan suatu bank demi menghasilkan pendapatan bunga bersih dan pendapatan lainnya selain pendapatan bunga.

3. *Overhead Efficiency*

Overhead efficiency cukup efektif dalam menunjukkan sejauh mana pihak bank mampu menciptakan efisiensi terhadap biaya-biaya overhead, seperti biaya umum (biaya listrik, air & pemeliharaan alat-alat kantor/inventaris), biaya tenaga kerja, dan biaya administrasi.

Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (Ponco, 2012).

Rasio Beban Operasional (BOPO) yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Menurut Siamat (2015), rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut Almilia dan Herdiningtyas (2013:78) : “Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.”

Menurut Rivai (2013:131), BOPO adalah biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2011:101) mengemukakan BOPO adalah biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Beban Operasional pendapatan operasional dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio beban operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup beban operasional dengan pendapatan operasionalnya.

2.2.2. Kecukupan Modal

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan

dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Dendawijaya (2012:121) menjelaskan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. Sedangkan Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) mendefinisikan CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau apakah modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhan. Artinya, permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Persentase kebutuhan modal minimum yang diwajibkan menurut Bank of International Settlements (BIS) disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*Capital Adequacy Ratio*), yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut

risiko (ATMR) menurut Kasmir (2012:300). Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* ini didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanamannya. Berdasarkan Pakfeb 1991, perbankan diwajibkan memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Minimum atau dikenal dengan CAR, yang diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sejalan dengan standar yang ditetapkan *Bank of International Settlements* (BIS), terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Modal yang dimaksud terdiri dari:

1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap.
2. Modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Umam (2012:342), modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap sebagai berikut:

1. Modal inti adalah jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan merupakan bagian terpenting dalam bank. Apabila terdapat *goodwill* maka perhitungan atas jumlah seluruh modal inti harus dikurangi dengan *goodwill* tersebut. Modal inti terdiri atas:
 - a. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya (pemegang saham) bagi bank yang berbadan hukum. Koperasi modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.
 - b. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - c. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat

- persetujuan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing
- d. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota.
 - e. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - f. Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
 - g. Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
 - h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*) adalah bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya yang dikonsolidasikan yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan (Lembaga Keuangan Bukan Bank / LKBB) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank
2. Modal pelengkap yaitu modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, modal pelengkap dapat berupa:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba-rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 12,5% dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- c. Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang yang mempunyai ciri-ciri:
 - 1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
 - 2) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia
 - 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi.
 - 4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang berasal dari penyeteroran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi
- d. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman antara bank dengan pihak pemberi pinjaman dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Pinjaman ini merupakan pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman
- 2) Mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh bank bersangkutan dan telah dibayar penuh
- 3) Minimal berjangka waktu 5 tahun
- 4) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank harus sehat.
- 5) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal)

Pinjaman subordinasi yang diperhitungkan tidak lebih dari 50% dari modal inti, sedangkan modal pelengkap yang diperhitungkan sebagai modal bank setinggi-tingginya 100% dari modal inti.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Disamping itu, ketentuan BI juga mengatur cara perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri atas jumlah antara ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing.

CAR merefleksikan kemampuan sebuah bank menghadapi kemungkinan risiko kerugian tak terduga. Karena itu tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan. Hal ini selanjutnya dapat mempengaruhi penerimaan pasar terhadap bank tersebut yang tergambar antara lain dari *borrowing rate* yang harus dibayarnya. CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aset Tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

2.2.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Menurut Murni (2009:196) inflasi adalah : kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus”.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2012). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2010). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2011). Kenaikan sejumlah bentuk barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Inflasi Putra (2011:88) diantaranya sebagai berikut :

1. Permintaan Uang

Irving Fisher mengatakan bahwa “pada hakikatnya berpendapat bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang

sama cepatnya ke atas harga”. Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ini berarti terdapat korelasi positif antara pertumbuhan uang (JUB) dan inflasi, yang dapat dijadikan prediksi teori kuantitas bahwa pertumbuhan uang yang tinggi mengarah pada inflasi yang tinggi sehingga pertumbuhan dalam money supply menentukan tingkat inflasi.

2. Tingkat Suku Bunga

Menurut Nopirin (2011:58) suku bunga adalah biaya yang harus di bayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran Suhedi (2010:67). Apabila jumlah uang yang beredar dimasyarakat meningkat, maka Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga SBI, yang mana kenaikan tingkat suku bunga SBI tersebut akan mempengaruhi tingkat bunga tabungan dan kredit pada bank umum (suku bunga kredit meningkat diatas tingkat suku bunga (SBI), sehingga investasi pada sektor riil akan mengalami penurunan yang akan berdampak pada penurunan output (dengan asumsi permintaan konstan) sehingga akan menyebabkan tingkat harga semakin tinggi (inflasi semakin tinggi). Sehingga tingkat suku bunga mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat inflasi. Inflasi yang terjadi karena *cost-push inflation*.

3. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun Dumairy (2013:61). Atau bisa dikatakan produk domestik bruto (PDB) adalah konsep pengukuran tingkat kegiatan

produksi dan ekonomi aktual suatu negara. Transaksi dan output sangat berkaitan karena semakin banyak barang yang dibeli dan dijual. Besarnya Produk domestik bruto (PDB) dinyatakan dalam satuan uang, namun nilai mata satuan uang berubah sepanjang waktu. Perubahan yang terjadi pada umumnya berupa penurunan nilai uang akibat inflasi.

4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dengan Dollar.

Nilai tukar Rupiah atau disebut juga kurs Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara dimana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing atau kurs Salvatore (2013:85). Variabel kurs Dollar Amerika Serikat memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap inflasi di Indonesia. Melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing yang disebabkan oleh hutang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta yang membengkak maka berakibat pada penurunannya harga barang-barang ekspor kita diluar negeri, sehingga barang ekspor kita menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang dari negara lain. Penurunan harga tersebut menyebabkan peningkatan pada penjualan (hukum permintaan "apabila harga barang menurun maka jumlah barang yang diminta akan bertambah"), sehingga penerimaan ekspor kita meningkat serta kemampuan untuk mengimpor barang juga meningkat maka supply barang didalam negeri akan meningkat yang akan berdampak pada penurunan harga barang tersebut. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi, bertambahnya barang didalam negeri cenderung menurunkan harga.

Mc Eachern (2010:133) membagi jenis inflasi berdasarkan sumbernya, yaitu :

1. *Demand Pull Inflation*

Terjadinya kenaikan harga secara berkelanjutan disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat.

2. *Cosh Push Inflation*

Harga terus menerus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penurunan tingkat penawaran agregat.

Lebih lanjut Mc Eachern (2010:136), menyebutkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari inflasi dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, yang berpengaruh terhadap kesesjah traan ekonomi, sebab redistribusipendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan orang lainnya jatuh.
2. Inflasi dapat menyebabkan penurunan di dalam efisinsi ekonomi. Karena inflasi dapat mengalahkan sumber daya dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.
3. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahaan di dalam output dan kesempatan kerja, dengan cara lebih langsung dengan motivasi perusahaan memproduksi dan membuat orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang dilakukan.
4. Inflasi dapat menyebabkan lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi akan naik di masa yang akan datang, maka mendorong mereka untuk membeli barang-barang dan jasa secara besar-besaran.

2.2.4. Pembiayaan Bermasalah

Menurut (Antonio, 2011:331) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan Deficit Unit. Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: “Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Suatu kenyataan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari financing portofolio dari sebuah bank syariah, namun pemberian pembiayaan yang sukses adalah bank yang mampu mengelola pembiayaan bermasalah pada suatu tingkat wajar yang tidak menimbulkan kerugian bank yang bersangkutan.

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoodin (2010:2) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoodin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Selanjutnya Djamil (2014:34) menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5) (Bank_Indonesia, 2003).

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut.

Pembiayaan bermasalah biasanya muncul secara bertahap dengan didahului oleh beberapa gejala (*red flags*). Menurut Mahmoeddin (2010:6) gejala-gejala tersebut berupa:

1. Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi tentang gejala awal munculnya masalah, misalnya saldo rekening sering mengalami *overdraft*, saldo giro rata-rata menurun, terjadi penurunan saldo secara drastis, pembayaran pokok angsuran tersendat-sendat, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, sering mengajukan permintaan penundaan atau perpanjangan pembayaran, penyimpangan penggunaan pembiayaan, mengajukan penambahan pembiayaan, dan mengajukan penjadwalan ulang pembiayaan.

2. Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Attitudes*)

Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, penurunan perputaran modal pembiayaan, peningkatan piutang, penurunan perputaran persediaan, penurunan rasio aktiva lancar terhadap aktiva total, penurunan aktiva tetap, penjualan meningkat namun laba menurun, *debt equity ratio* meningkat, utang jangka panjang meningkat tajam, muncul hutang dari bank lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, laporan keuangan sering terlambat, laporan keuangan tidak diaudit, persentase laba terhadap aktiva menurun, laporan keuangan direkayasa, harga penjualan terlalu rendah dan berada di bawah titik impas.

3. Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitudes*)

Dalam kategori ini, gejala pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan *supply* barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, mulai terlibat spekulasi bisnis, hubungan dengan bank semakin renggang, enggan dikunjungi, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain, ada klaim dari pihak ketiga, ada pemogokan buruh, nilai agunan menurun, nasabah alih usaha pokok, mencari pinjaman baru.

4. Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*)

Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya: kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu, dan lain-lain.

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Menurut Usanti (2014), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: *pertama*, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*). Dalam kondisi ini, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana *restrukturisasi* atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/analisa *restrukturisasi* berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama. *Kedua*, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan/ atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: penyerahan agunan/ aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.

Bank syariah melakukan pembiayaan sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam praktik perbankan sehari-hari, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan

pembiayaan macet. NPL atau NPF adalah kredit yang kategori kolektibilitasnya di luar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus (Leon dan Ericson dalam Poetry dan Sanrego 2011).

Non performing financing adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. (Mutaminah dan Chasanah 2012).

Menurut Mahmoeeddin (2010:3), *Non Performing Financing* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun.

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) yang diinstruksikan Bank Indonesia dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Efisiensi terhadap Pembiayaan bermasalah

Untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran kredit bank, yang salah satunya merupakan kegiatan operasional bank, maka digunakan rasio BOPO. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan bahwa bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasional. Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah

90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank terdapat dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas kredit karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran kredit (Sari, 2014:6)

2.3.2. Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan bermasalah

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). CAR adalah rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modalpelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).Kecukupan modalmerupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung risikokerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaanyang diberikan kepada nasabahnya.Ketika CAR pada BUS meningkat, maka BUS akan merasa aman untukmenyalurkan pembiayaannya. Namun, hal ini berakibat BUS akan merasa lebihlonggar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi,maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akansemakin besar, sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF (Mardiani,2013).CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Penurunan jumlah CAR merupakan akibat dari menurunnya jumlah modal bank atau meningkatnya jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).Jumlah modal bank yang kecil disebabkan oleh adanya penurunan laba yang diperoleh perusahaan.Penurunan laba yang terjadi pada bank salah satunya terjadi karena peningkatan kredit bermasalah atau kualitas kredit yang buruk (Taswan, 2010). *Capital Adequacy Ratio* menurut Lukman Dendawijaya (2012) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Rasio CAR diperoleh dari perbandingan antara modal yang dimiliki dengan Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR). Bank Indonesia menyatakan bahwa permodalan berpengaruh negatif terhadap

kondisi bermasalah. Seperti yang diungkapkan oleh Hermawan Soebagio (2015) bahwa CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap terjadinya NPL.

2.3.3. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan bermasalah

Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Salah satunya, indikator variabel makro adalah inflasi, inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (*intrinsik*) mata uang suatu Negara. (Khalwaty, 2010). Sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang. Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun (Mutamimah dan Chasanah, 2012). Menurut Martono dan Agus Harjito (2012), inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan *return* perusahaan. Penurunan *return* yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit macet, sehingga meningkatkan angka *Non-Performing Loan*. Seperti hasil penelitian dari (Taswan, 2010) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi maka akan semakin tinggi pula tingkat NPF.

2.3.4. Pengaruh Efisiensi, Inflasi dan Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan bermasalah

Permasalahan pembiayaan di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian menyertakan variabel efisiensi dan kecukupan modal sebagai variabel internal dan inflasi sebagai variabel eksternal. Penelitian ini menduga tingkat efisiensi, inflasi dan kecukupan modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

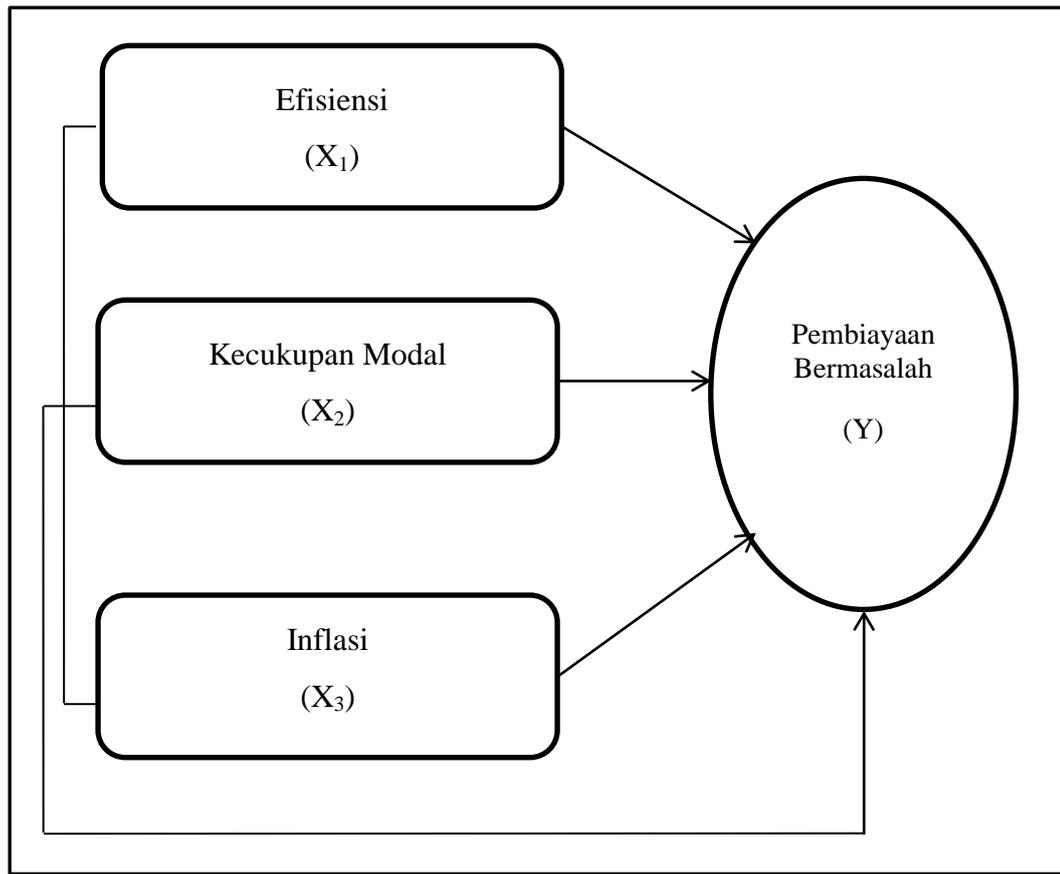
2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012: 96), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H_{01} : Secara parsial tidak terdapat pengaruh efisiensi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 H_{a1} : Secara parsial terdapat pengaruh efisiensi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. H_{02} : Secara parsial tidak terdapat pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 H_{a2} : Secara parsial terdapat pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. H_{03} : Secara parsial tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 H_{a3} : Secara parsial terdapat pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. H_{04} : Secara simultan tidak terdapat pengaruh efisiensi, kecukupan modal dan inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 H_{a4} : Secara simultan terdapat pengaruh efisiensi, kecukupan modal dan inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori mengenai konsep mengenai pembahasan bagaimana pengaruh efisiensi, kecukupan modal dan inflasi secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut :



Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran